



# Karakter Bangsa dan Tantangan Bela Negara di Era Google Veo 3 dalam Perspektif Damai dan Resolusi Konflik

Junior Ternama Siahaan<sup>1</sup>, Halomoan FS Alexandra<sup>2</sup>, Parluhutan Sagala<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

[junior.siahaan@kn.idu.ac.id](mailto:junior.siahaan@kn.idu.ac.id)

## ABSTRACT

### Keywords:

Google Veo 3;  
Visual Disinformation;  
National Defense;  
National Character;  
National Identity;  
Digital Literacy;  
Conflict Resolution.

**Abstract:** *The advancement of generative visual technology, particularly Google Veo 3, has significant implications for national character and the challenges of national defense in the digital era. This technology enables the creation of realistic videos from simple text, which, on one hand, can be utilized for educational purposes, but on the other hand, opens opportunities for the dissemination of visual disinformation such as deepfakes. This study adopts a descriptive-analytical focus, employing a literature review with a thematic content analysis approach on relevant literature and case studies regarding the use of Google Veo 3, to examine its impact on social stability, democratic processes, and the values of Pancasila from the perspective of Peace and Conflict Resolution. The analysis reveals that this technology has the potential to serve as an instrument of conflict through the manipulation of public perception, identity politics, and the delegitimization of state institutions. However, other findings indicate that these risks can be mitigated through digital literacy, the strengthening of national ethics, and cross-sector collaboration. This study emphasizes that national defense in the digital era encompasses not only physical protection but also cognitive and ideological efforts to safeguard national identity amidst the escalating visual information warfare.*

### Kata Kunci:

Google Veo 3;  
Disinformasi Visual;  
Bela Negara;  
Karakter Bangsa;  
Identitas Nasional;  
Literasi Digital;  
Resolusi Konflik.

**Abstrak:** Kemajuan teknologi generatif visual, khususnya Google Veo 3, memiliki implikasi signifikan terhadap karakter bangsa dan tantangan bela negara di era digital. Teknologi ini memungkinkan pembuatan video realistis dari teks sederhana, yang di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk edukasi, namun di sisi lain membuka peluang penyebaran disinformasi visual seperti *deepfake*. Penelitian ini berfokus pada deskriptif analitik yang menggunakan studi Pustaka dengan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*) terhadap literatur dan studi kasus terkait pemanfaatan Google Veo 3, untuk menelaah dampaknya terhadap stabilitas sosial, proses demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Damai dan Resolusi Konflik. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi ini berpotensi menjadi instrumen konflik melalui manipulasi persepsi publik, politik identitas, dan delegitimasi institusi negara. Namun, temuan lain mengindikasikan bahwa risiko tersebut dapat ditekan melalui literasi digital, penguatan etika kebangsaan, dan kerja sama lintas sektor. Studi ini menegaskan bahwa bela negara di era digital tidak hanya mencakup pertahanan fisik, tetapi juga perjuangan kognitif dan ideologis dalam melindungi identitas nasional di tengah eskalasi perang informasi visual.

### Article History:

Received : 23-07-2025  
Revised : 12-08-2025  
Accepted : 15-08-2025  
Online : 09-09-2025



<https://doi.org/10.31764/pendekar.v8i3.33368>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

## A. LATAR BELAKANG

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, hampir seluruh aspek kehidupan kini bergantung pada sistem digital, teknologi internet, perangkat lunak, aplikasi, dan berbagai perangkat elektronik. Transformasi digital ini memberikan keuntungan besar, khususnya dalam hal kecepatan dan kemudahan akses terhadap informasi (Kurniati, 2024). Perkembangan teknologi kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam produksi konten visual. Salah satu kemajuan paling mutakhir

di bidang ini adalah kemunculan Google Veo 3, sebuah model AI generatif yang mampu menghasilkan video dengan kualitas tinggi dan realisme visual yang sangat meyakinkan hanya dengan memasukkan kalimat perintah sesuai permintaan pengguna (Antara, 2025; Google Indonesia, 2025; Idn Times, 2025; Kompas, 2025; Tempo, 2025). Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang baru dalam bidang pendidikan, hiburan, dan komunikasi digital. Namun di sisi lain, kemampuan AI untuk menciptakan konten visual yang sulit dibedakan dari kenyataan juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait penyebaran disinformasi visual, terutama dalam bentuk video *deepfake*, manipulasi persepsi publik, dan rekayasa narasi yang menyesatkan (Verdoliva, 2020).

Fenomena ini berpotensi digunakan sebagai alat propaganda, penghasutan, atau bahkan memecah-belah masyarakat, khususnya dalam konteks sosial-politik yang rawan. Dampaknya, nilai-nilai dasar kebangsaan seperti integritas sebuah informasi, kepercayaan publik, dan rasa persatuan nasional dapat terkikis (Putri et al., 2025). Masyarakat yang tidak memiliki literasi digital yang kuat akan lebih rentan terpapar manipulasi, yang pada akhirnya bisa memicu konflik horizontal dan memperlemah kohesi nasional (Nurdin & Nugraha, 2025). Penting untuk menempatkan isu disinformasi visual berbasis AI dalam kerangka ketahanan nasional, karakter bangsa, dan bela negara, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas ideologis Indonesia di era digital (Azzahra et al., 2024).

Karakter bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi nilai-nilai luhur Pancasila, semangat persatuan dalam keberagaman, serta kesadaran sejarah kolektif yang menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan Anggoro & Albina (2025) Namun, perkembangan teknologi kecerdasan buatan khususnya dalam bentuk disinformasi visual berbasis AI menjadi ancaman baru yang berpotensi merusak fondasi identitas nasional dan persatuan dalam keragaman (Putri et al., 2025). Hal ini dapat mengganggu pembentukan sikap nasionalisme dan kesadaran bela negara, karena publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap informasi, sejarah, bahkan simbol-simbol kebangsaan yang dijadikan objek manipulasi (Nikmatul Fitri et al., 2025). Akibatnya, potensi konflik horizontal meningkat, dan kesatuan sosial yang selama ini dijaga melalui nilai-nilai karakter bangsa bisa terkoyak. Oleh karena itu, isu disinformasi visual AI tidak hanya menjadi masalah teknologi, tetapi juga menyangkut pembentukan dan perlindungan karakter bangsa di era pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini.

Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan dinamika politik domestik, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kesadaran bela negara yang kuat dan berlandaskan pada karakter bangsa. Nilai dasar kesadaran bela negara merupakan Pondasi Perdamaian. Bela negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara yang diekspresikan dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, serta kerelaan berkorban demi negara (Faridah et al., 2023). Di tengah maraknya konflik sosial dan polarisasi politik, nilai bela negara dapat menjadi modal sosial untuk meredam konflik dan memperkuat harmoni sosial. Program pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan ruang digital perlu ditingkatkan agar generasi muda tidak kehilangan arah dalam dinamika globalisasi (Rahayu et al., 2019).

Kemajuan teknologi visual berbasis AI, khususnya Google Veo 3, menghadirkan tantangan baru yang sejalan dengan konsep *irregular warfare* dan *war by information* (Mirghahari, 2023). Melalui *deepfake* dan teknik manipulasi gambar dan video, aktor baik negara maupun non-negara dapat menciptakan narasi palsu yang dirancang untuk memecah belah masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, dan memicu konflik horizontal (Latif & Waroi, 2024). Kondisi ini menandakan bahwa medan peperangan modern tidak hanya di garis depan, tetapi juga di ruang maya, di mana perang narasi dan identitas menjadi instrumen utama (Paterson & Hanley, 2020).

Untuk menghadapi ancaman kontemporer tersebut, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil (Shu et al., 2020). Pemerintah harus merumuskan kebijakan literasi digital dan regulasi teknologi yang menekan penyebaran konten palsu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi (Time, 2021). Akademisi berperan dalam melakukan penelitian, mengembangkan kurikulum literasi media, serta memantau tren disinformasi. Media memiliki tanggung jawab menjalankan jurnalisme yang akurat, transparan, dan beretika dalam memverifikasi informasi. Sementara itu, masyarakat sebagai garis depan harus dibekali kemampuan deteksi dini (*early detection*) serta kesadaran kritis untuk menolak dan melaporkan konten manipulatif (Malik, 2017). Dengan demikian, kesadaran kolektif dapat terbangun dan karakter bangsa akan semakin tangguh di era digital. Dalam membangun budaya damai dan kecepatan dalam menemukan resolusi konflik di Indonesia, diperlukan integrasi antara kewaspadaan nasional, penguatan nilai bela negara, perbaikan etika politik, penanaman nasionalisme, serta kesiapan menghadapi ancaman digital pada demokrasi Indonesia (Galtung, 1996).

Kemunculan teknologi generatif visual seperti Google Veo 3 membuka babak baru dalam kontestasi informasi yang semakin kompleks di ruang publik digital (felloai.com, 2025; thelocalbrand.com, 2025; Turk, 2024). Dengan kemampuannya merekonstruksi realitas secara hiper-realistis melalui video berbasis AI, Google Veo 3 bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen yang dapat membentuk persepsi kolektif, mempengaruhi opini publik, serta mempercepat mobilisasi politik maupun sosial dalam skala luas (Latif & Waroi, 2024). Di satu sisi, teknologi ini berpotensi menjadi medium edukasi, diseminasi nilai-nilai kebangsaan, dan rekonsiliasi sosial. Namun di sisi lain, ia juga membawa potensi destruktif bila disalahgunakan untuk disinformasi, provokasi identitas, dan polarisasi ideologis (Sonni et al., 2025).

Dalam konteks politik demokrasi, Google Veo 3 menghadirkan tantangan serius terhadap kualitas partisipasi warga negara dalam kontestasi politik dan demokrasi (Łabuz & Nehring, 2024). Manipulasi visual yang menyerupai kebenaran dapat digunakan untuk menggiring narasi politik yang menyesatkan, mengganggu integritas pemilu, serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara (Sarjito, 2024). Di tengah ekosistem politik yang rentan terhadap fragmentasi, teknologi ini dapat memicu konflik horizontal berbasis SARA, mengancam kohesi sosial, serta memperlemah semangat bela negara yang semestinya dilandasi kesadaran kritis dan cinta tanah air. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan literasi digital yang tinggi, terutama dari generasi muda sebagai target utama konten digital (Adhari et al., 2024; Pratiwi et al., 2024).

Dengan demikian, karakter bangsa dan tantangan bela negara di era Google Veo 3 tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi ancaman fisik, tetapi juga kesiapan ideologis, kognitif, dan sosial dalam menghadapi perang informasi visual yang semakin canggih (Van Diggelen et al., 2025). Era ini menuntut integrasi antara pendekatan keamanan dan pendekatan damai, antara regulasi negara dan ketahanan sosial (Norman & Mikhael, 2023). Potensi konflik maupun potensi damai dari kehadiran teknologi Google Veo 3 menjadi cerminan dari sejauh mana bangsa ini mampu menjaga integritas karakter kebangsaannya sembari merespons disrupti teknologi secara arif, demokratis, dan berkeadaban. Tulisan ini disusun dengan tiga tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis secara kritis dampak kemunculan teknologi AI video seperti Google Veo 3 terhadap proses pembentukan dan potensi pelemahan karakter bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila, persatuan dalam keberagaman, dan narasi sejarah kolektif yang selama ini menjadi fondasi identitas nasional serta kewaspadaan nasional dalam perspektif damai dan resolusi konflik. Kedua, untuk menggali tantangan aktual dalam menanamkan semangat bela negara di era di mana informasi visual dapat dimanipulasi secara masif. Ketiga, tulisan ini bertujuan menawarkan rangkaian solusi strategis berupa rekomendasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yaitu metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang bertumpu pada penelaahan dan analisis terhadap berbagai referensi tertulis, baik yang bersifat teoretis maupun berbasis data empiris (Zed, 2008). Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi, konsep dan hasil penelitian dari sumber-sumber yang relevan yang diterbitkan 10 tahun terakhir yang berhubungan dengan variabel penelitian ini, seperti buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, laporan resmi dari institusi pemerintah maupun organisasi internasional, serta media massa yang kredibel. Penelitian berfokus pada deskriptif analitik. Dari data-data yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*) yang mencakup pembacaan kritis, identifikasi dan kategorisasi tema utama, analisis komparatif antar sumber, serta penyusunan sintesis temuan menjadi kerangka argumentasi yang koheren, sehingga interpretasi dan kesimpulan yang diperoleh memiliki landasan metodologis yang kuat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital dewasa ini telah memberikan transformasi signifikan dalam kehidupan sosial. Di satu pihak, teknologi ini membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, mempermudah komunikasi lintas jarak, serta menciptakan berbagai peluang baru di beragam sektor kehidupan (Jatnika et al., 2025). Di sisi lain, teknologi digital juga dapat menimbulkan berbagai risiko apabila tidak digunakan dan dikelola secara bijak, seperti penyebaran informasi palsu, terjadinya perpecahan sosial, serta gangguan terhadap privasi dan keamanan data pribadi (Jatnika et al., 2025).

### 1. Kewaspadaan Nasional

Perkembangan teknologi generatif AI, misalnya model video AI terbaru seperti Google Veo 3 telah membuka era baru ancaman disinformasi visual. Menurut Nurdin dan Nugraha Nurdin & Nugraha (2025) bahwa teknologi *deepfake* dapat menciptakan konten audio-visual hiper-realistis yang menyebarkan disinformasi, memanipulasi opini publik, dan menimbulkan ketidakpastian sistemik. Dalam konteks Indonesia (penetrasi internet tinggi, literasi digital rendah), efeknya semakin berat: legitimasi institusi, proses demokrasi, dan kohesi sosial rentan tergerus oleh konten palsu AI. Disinformasi berbasis AI bukan sekadar masalah teknis melainkan juga psikologis, politik, dan struktural; solusi yang diperlukan mencakup reformasi regulasi, forensik digital, dan peningkatan literasi publik. Karena konten visual diproses lebih cepat dan berpengaruh lebih lama dalam pikiran manusia Graber 1990; Jakus (2018), hiper-realistisitas *deepfake* berpotensi lebih mudah diterima publik. Misalnya, TIME melaporkan Veo 3 sanggup membuat video provokatif (kejadian kekerasan atau kecurangan politik) yang jika beredar dengan teks menyesatkan dapat memicu kerusuhan sosial. Dengan demikian, generative AI dapat secara drastis meningkatkan kecepatan dan skala penyebaran propaganda gambar maupun video (Time, 2025).

Di ranah politik, disinformasi visual AI dapat mengganggu proses demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Ketidakpastian yang ditimbulkan disinformasi AI memperbesar risiko pada proses demokrasi dan legitimasi kelembagaan (Nurdin & Nugraha, 2025). Sebagai contoh hipotetis, sebuah video *deepfake* audio pejabat mengumumkan permintaan bantuan militer asing di Papua dapat memantik kepanikan publik dan menuntut klarifikasi pemerintahan. Studi global juga menunjukkan AI *imagery* digunakan dalam kampanye disinformasi politik dan narasi permusuhan terhadap kelompok rentan, sehingga dapat destabilisasi proses politik dan demokrasi. Ini sejalan dengan konsep perang kognitif dalam strategi pertahanan, yaitu manipulasi persepsi publik melalui *framing* narasi dan agenda *setting*. Seperti yang dijelaskan pada kajian Kemhan, propaganda digital dan disinformasi di media sosial dapat dipakai oleh aktor negara maupun non-negara untuk memanipulasi informasi dan merubah opini publik serta perilaku sosial. Dengan kata lain, alat-alat AI seperti Google Veo 3 berpotensi menjadi senjata perang informasi (*information warfare*) yang

dapat membentuk opini tanpa perlu kekuatan militer langsung. Dampaknya: polarisasi politik meningkat, kepercayaan terhadap proses pemilu dan institusi merosot, dan legitimasi negara menjadi goyah. Kondisi ini bertentangan dengan semangat bela negara dan persatuan nasional, karena tujuan bela negara adalah menjaga kedaulatan melalui kesadaran kritis warga.

Di ranah sosial, disinformasi visual AI memicu fragmentasi dan ketidakpercayaan antar kelompok. Konten palsu yang menargetkan suku, agama, atau kelompok politik tertentu dapat menyulut kebencian dan permusuhan, bahkan kekerasan. Indonesia, dengan keberagaman tinggi, sangat rentan terhadap narasi pemecah-belah semacam itu. Efek *deepfake* adalah menciptakan efek berantai disinformasi yang memperparah fragmentasi sosial dan melemahkan kohesi nasional. Masyarakat dengan literasi digital rendah menjadi target empuk kampanye semacam ini. Ketergantungan tinggi pada platform digital tanpa filter membuat batas antara fakta dan rekayasa semakin kabur. Dalam situasi banjir informasi, warga cenderung menggunakan heuristik sederhana untuk menilai kredibilitas: kemiripan visual konten sering membuat informasi salah terlihat benar. Selain itu, konten penuh sentimen emosional memicu reaksi kuat dan menjatuhkan kemampuan analitis pengguna. Akibatnya, disinformasi AI dapat menurunkan kemampuan masyarakat mengenali hoaks, sehingga kepercayaan publik terhadap media dan institusi melemah. Studi lain menegaskan bahwa *deepfake* mampu memperdalam polarisasi sosial dan menciptakan kepercayaan publik yang rapuh. Poin pentingnya: masyarakat yang tanggap bela negara harus dipersenjatai oleh ketahanan informasi, yaitu kebiasaan kritis menyeleksi konten, dan sistem deteksi hoaks. Negara Indonesia perlu membangun pertahanan kognitif melalui literasi digital dan pelatihan deteksi konten palsu.

Disinformasi AI juga mengancam karakter bangsa nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan. Konten buatan seperti video kebencian atau propaganda ekstrem dapat menimbulkan keresahan budaya, memanipulasi simbol nasional, atau menyerang reputasi tokoh bangsa. Menurut Bygrave kedaulatan kognitif suatu bangsa melibatkan perlindungan terhadap nilai dan budaya nasional dari pengaruh luar yang berbahaya (Bygrave, 2022). Artinya, Indonesia harus menjaga agar warganya tidak terpengaruh pesan-pesan asing yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi kunci, karena tanpa penyaringan budaya, disinformasi bisa merusak kerukunan antar-agama dan merusak kebhinnekaan. Penelitian Fitri et al menyoroti bahwa meski teknologi dapat menanamkan nilai kebangsaan, ketergantungan tinggi pada media digital berpotensi melemahkan semangat bela negara dan karakter mandiri pemuda (Fitri et al., 2022). Selain itu, literasi kritis atas berita bohong dan ujaran kebencian sangat penting agar tidak menggerus persatuan bangsa. Secara ringkas, disinformasi visual yang tidak diantisipasi dapat menumbangkan kepercayaan kolektif terhadap budaya lokal dan norma sosial, sehingga merusak identitas nasional. Menghadapi ancaman ini, pendekatan komunikasi strategis berbasis nilai (seperti *gatekeeping* informasi positif, narasi kontra-*hoax*) perlu dikembangkan, sesuai teori-teori *framing* dan agenda *setting*.

Ancaman disinformasi visual AI harus dilihat sebagai tantangan terhadap kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional didefinisikan sebagai kualitas kesiapsiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan mengambil tindakan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Artinya, warga negara perlu selalu waspada menyaring informasi serta aktif menangkal hoaks sebagai bagian dari bela negara. Pendiriannya berakar dari nasionalisme dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, menghadapi disinformasi AI memerlukan paradigma bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Misalnya, kebutuhan akan kedaulatan kognitif menuntut peningkatan literasi digital yang mendalam serta penguatan nilai-nilai budaya nasional. Upaya ini meliputi edukasi kewarganegaraan digital sejak dini, kampanye literasi media, dan implementasi kegiatan bela negara yang modern (seperti pelatihan verifikasi konten bagi pemuda). Regulasi juga perlu diperkuat, meski UU ITE telah ada, perlu payung hukum khusus yang mengkategorikan dan menghukum penyebar *deepfake* berbahaya. Di sisi militer dan pertahanan, konsep Sishankamrata (sistem pertahanan rakyat semesta) harus diperluas ke ranah digital—mengajak masyarakat sipil,

lembaga, dan swasta berkolaborasi membangun filter informasi. Sebagaimana rekomendasi, pengembangan teknologi deteksi *deepfake*, forum-forum kewaspadaan (seperti FKDM, FKUB), serta partisipasi aktif dalam patroli media sosial juga dapat diintensifkan. Singkatnya, kewaspadaan nasional menuntut sinergi strategi kebijakan publik, keamanan informasi, dan penguatan budaya untuk mempertahankan integritas karakter bangsa. Dengan penerapan kewaspadaan nasional (lingkungan strategis) yang komprehensif yakni kesadaran dan aksi kolektif, dapat memperkuat daya tangkal terhadap disinformasi visual AI. Ketahanan bangsa di era digital ini ditopang oleh warga yang kritis dan nilai-nilai nasional yang kuat. Dalam jangka panjang, strategi bela negara mutakhir harus mengintegrasikan literasi media sebagai bagian fundamental, sehingga karakter bangsa tidak mudah dirusak oleh propaganda visual asing dan domestik.

## 2. Nilai Dasar Kesadaran Bela Negara Dan Identitas Nasional

Perkembangan pesat teknologi AI video generative, misalnya Google Veo 3, mempermudah pembuatan konten visual palsu yang sangat meyakinkan. Konten video *deepfake* atau sintetik dapat menyebar luas tanpa verifikasi, sehingga masyarakat rentan dipengaruhi oleh informasi keliru. *Deepfake* memungkinkan pembuatan konten audio-visual sangat realistis namun dibuat-buat yang dapat menyebarkan disinformasi dan memanipulasi opini publik. Dalam konteks Indonesia, penetrasi internet tinggi tetapi literasi digital rendah, fenomena ini meningkatkan risiko terhadap legitimasi kelembagaan, proses demokrasi, dan kohesi sosial (Nurdin & Nugraha, 2025). Situasi ini jelas mengancam ketertiban sosial dan stabilitas politik: ketika disinformasi visual berbasis AI menciptakan ketidakpastian sistemik, kemampuan negara untuk menjaga stabilitas nasional dapat terganggu.

Ancaman ini merusak kepercayaan publik. Nurdin dan Nugraha memberi contoh konkret mengenai video rekayasa konflik di Papua atau audio palsu pejabat meminta bantuan militer asing dapat memicu reaksi panik masyarakat dan terus-menerus memaksa klarifikasi pemerintah, menggerus kepercayaan publik terhadap negara (Nurdin & Nugraha, 2025). Disinformasi visual bekerja secara lebih dalam dibandingkan disinformasi konvensional, karena menyerang pemrosesan intuitif informasi otak manusia. Saat melihat video yang tampak nyata, skeptisisme masyarakat melemah. Akibatnya, persepsi publik terhadap tokoh atau peristiwa politik dapat dengan mudah dibentuk oleh visualisasi palsu yang tampak nyata dan emosional. Efeknya, nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme dan rasa persatuan berisiko terkikis, sekaligus nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air terancam tergerus.

Karakter bangsa Indonesia dibangun dari nilai-nilai luhur Pancasila, cinta tanah air, kesadaran berbangsa, persatuan, serta kesediaan berkorban untuk negara. Menurut konsep pertahanan ideologis, nilai-nilai ini harus kokoh dijaga sebagai landasan pertahanan negara. Namun, disinformasi visual menggoyahkan ikatan kolektif tersebut. Data menunjukkan kesadaran bela negara generasi muda relatif rendah di era digital. Hartono menegaskan Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran bela negara yang diyakini dapat melemahkan ketahanan nasional (Hartono, 2022). Rendahnya kesadaran bela negara ditandai semakin berkembangnya sikap hedonis, pragmatis, dan kurangnya rasa solidaritas antarwarga, serta menurunnya apresiasi budaya nasional. Jika warga muda mudah terpengaruh video manipulatif, karakter kebangsaan yang mengedepankan Pancasila dan persatuan bisa semakin luntur.

Secara lebih spesifik, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran sentral dalam mempertahankan identitas nasional. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang menjadi pedoman seluruh warga dalam kehidupan berbangsa (Afdhali & Triadi, 2023). Nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita normatif penyelenggara negara dan sarana pemersatu masyarakat. Dalam konteks pertahanan, nilai sila Ketiga (Persatuan Indonesia) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib berpartisipasi melindungi dan mempertahankan NKRI. Dengan kata lain, Pertahanan dan

keamanan nasional seyogyanya disandarkan pada nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah konsensus pertahanan negara demi keutuhan NKRI. Disinformasi yang menimbulkan polarisasi, intoleransi, atau keraguan terhadap sejarah dan budaya bisa menghancurkan fondasi ideologis ini. Misalnya, video provokatif terkait isu sensitif akan mudah memecah belah masyarakat dan merusak jiwa Pancasila sebagai pandangan hidup bersama.

Secara ringkas, konten manipulatif AI mengancam pembentukan karakter bangsa. Dengan memanipulasi atau menciptakan narasi bohong, disinformasi ini melunturkan semangat kebangsaan dan semangat bela negara. Hasil survei akademis menunjukkan bahwa generasi muda yang kurang peduli terhadap bela negara dan toleransi rentan timbul konflik antar kelompok. Karena itu, identitas nasional yang kuat (jati diri bangsa) menjadi krusial. Seperti dikatakan, Tidak ada bangsa yang besar dan kuat tanpa jati diri. Nilai luhur bangsa harus dilindungi dari pengaruh ideologi asing dan disinformasi berbahaya. Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dalam memperkuat bela negara dan identitas nasional:

- a. Keragaman Teknologi dan Kecepatan Penyebaran. AI video generative Google Veo 3 yang semakin mudah digunakan membuat perbanyak video palsu tak terkendali. Pembuatan video palsu kini bukan lagi domain eksklusif aktor negara melainkan tersedia bagi publik umum (Nurdin & Nugraha, 2025). Artinya, siapa pun (*Non-State Actor*) termasuk kelompok radikal atau asing dapat membuat propaganda visual realistik tanpa deteksi. Teknologi seperti ini memaksa pemerintah dan masyarakat terus-menerus melakukan klarifikasi dan verifikasi, yang melelahkan secara berulang.
- b. Literasi Digital yang Masih Rendah. Banyak warga belum terlatih mengenali kebohongan digital. Literasi yang sangat rendah memperkuat kerentanan terhadap disinformasi berbasis AI. Tanpa kemampuan memverifikasi sumber dan konten, masyarakat mudah termakan hoax. Ini menimbulkan kelemahan secara ideologis, karena warga yang kritis dan cerdas informasi merupakan benteng utama melawan propaganda.
- c. Implementasi dan Sinergi Pendidikan Kebangsaan. Menanamkan nilai bela negara seharusnya sejak dini. Materi pendidikan Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa belum optimal serta belum tersinergi baik antar Lembaga (Hartono, 2022). Pendidikan yang menanamkan sikap cinta tanah air, nasionalisme, dan pemahaman ideologi negara masih perlu diperkuat. Di era digital, Kurikulum Pendidikan Moral Pancasila dan pendidikan kebangsaan perlu disesuaikan agar mampu menjawab tantangan media sosial dan hoaks.
- d. Pertahanan Ideologis Berbasis Pancasila. Bangsa perlu menguatkan *wawasan kebangsaan*. Pancasila harus dihayati dan diterapkan sebagai pedoman (*guidance*) seluruh komponen bangsa (Afdhali & Triadi, 2023). Dalam hal ini, nilai luhur Pancasila (persatuan, keadilan sosial, gotong royong) harus ditanamkan secara konsisten sehingga menjadi filter alami terhadap pengaruh asing. Menumbuhkan jiwa bela negara berarti membentuk warga cinta tanah air, setia Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa – nilai-nilai yang esensial dalam bela negara.
- e. Pentingnya Kolaborasi. Pemerintah, TNI/POLRI, pendidikan, media, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi. Upaya seperti forum literasi media di sekolah, program pelatihan guru PKn, serta kampanye nilai kebangsaan di media digital dapat mengedukasi warga agar tidak mudah terprovokasi. Pelibatan *influencer*, tokoh masyarakat, dan pemimpin opini penting agar narasi kebangsaan lebih meyakinkan dan melakukan *counter* terhadap hoaks.

Namun demikian, bila dikelola secara strategis dan bijak, Google Veo 3 juga memiliki potensi sebagai alat pemersatu bangsa. Produksi konten visual yang menampilkan narasi damai, keberagaman, dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kontra-narasi terhadap polarisasi yang selama ini merusak tatanan demokrasi. Dalam perspektif resolusi konflik, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi budaya, membangun empati lintas kelompok sosial, serta merekonstruksi ulang identitas kebangsaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pemanfaatan ini tentu harus disertai regulasi yang tepat dan pengawasan publik yang partisipatif. Secara ringkas, langkah strategis menghadapi disinformasi visual berbasis AI tersebut mencakup:

- a. Literasi Digital dan Kritis. Meningkatkan kemampuan masyarakat (terutama pemuda) untuk memverifikasi konten video, memahami cara kerja *deepfake*, dan memprioritaskan sumber kredibel.
- b. Pendidikan Nilai Kebangsaan. Menanamkan nilai-nilai bela negara dan Pancasila dalam kurikulum formal maupun informal sehingga memupuk kesadaran kolektif akan jati diri bangsa.
- c. Deteksi dan Regulasi Teknologi. Mengembangkan tools forensik digital untuk mendeteksi *deepfake* serta menegakkan regulasi penggunaan AI video, agar pelaku disinformasi dapat diidentifikasi dan diberi sanksi.
- d. Penguatan Konten Positif Nasionalis. Memproduksi konten visual edukatif dan inspiratif tentang sejarah perjuangan bangsa, keberagaman budaya, dan keberhasilan nasional untuk memperkuat kebanggaan pada Indonesia.

Dengan komprehensifitas tersebut, Indonesia dapat memperkokoh semangat bela negara dan identitas nasional. Pancasila sebagai perekat bangsa harus terus dijaga relevansinya: Pertahanan dan keamanan nasional seyogyanya disandarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tanpa itu, serangan narasi palsu dapat mengikis arah bangsa. Oleh karena itu, konsep bela negara tidak cukup hanya latihan fisik; ia mencakup juga *pertahanan ideologis* dalam ranah informasi.

### 3. Politik Dan Kekuasaan

Dalam konteks politik kekuasaan negara, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti Google Veo 3 menimbulkan tantangan baru yang signifikan. Disinformasi visual yang dihasilkan oleh teknologi ini dapat digunakan sebagai alat manipulatif dalam perebutan kekuasaan politik, memperkuat polarisasi ideologi, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Teknologi *deepfake* dan manipulasi visual memungkinkan penciptaan konten palsu yang menyerang figur politik, membelokkan opini publik, dan bahkan mengganggu proses demokrasi Pemilihan Umum. Hal ini menandai bentuk baru dari ancaman politik yang menggabungkan teknologi dan strategi kekuasaan, yang oleh sejumlah ahli disebut sebagai bagian dari *informational warfare* dalam kerangka politik digital kontemporer (Bhardwaj & Sharma, 2024).

Dari perspektif teori politik kekuasaan, kekuasaan tidak lagi hanya bersifat represif dan koersif, tetapi juga bekerja melalui produksi pengetahuan dan kontrol informasi (Foucault, 1977). Dengan kemunculan AI video, aktor-aktor politik dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan narasi politik tertentu, menyebarkannya secara masif di ruang digital, dan mengontrol persepsi masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa perebutan kekuasaan kini tidak hanya berlangsung di arena institusional, tetapi juga di ruang persepsi visual dan psikologis masyarakat (Lindgren, 2023). Di sisi lain, ancaman ini juga memperlemah karakter bangsa karena merusak tatanan komunikasi publik yang sehat dan menumbuhkan sikap saling curiga antar kelompok sosial. Ketika disinformasi menjadi alat dalam kontestasi politik, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebersamaan yang menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia tergerus. Pada kontestasi pemilihan umum tahun 2019 terdapat polarisasi politik di tengah kehidupan Masyarakat yang mengakibatkan gesekan sosial yang mewarnai pesta demokrasi di Indonesia (The Converstion, 2019). Masyarakat menjadi mudah terpecah, apatis terhadap politik, dan cenderung skeptis terhadap upaya bela negara. Dalam kondisi ini, peran negara sangat penting untuk mengatur, mengawasi, dan mendidik masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk penguatan regulasi digital dan literasi politik.

Sebagai respons, strategi politik negara harus mengedepankan pendekatan transformatif yang tidak hanya menertibkan ruang digital, tetapi juga membangun ketahanan karakter politik masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital politik, pengawasan terhadap konten AI yang digunakan dalam kampanye atau komunikasi kekuasaan, dan pemberdayaan lembaga penyiaran publik serta komunitas literasi politik untuk menjaga kualitas demokrasi. Selain itu, kolaborasi antara negara, akademisi, dan media perlu diperkuat dalam membangun sistem etika informasi nasional guna memastikan kekuasaan dijalankan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.

#### 4. Demokrasi Indonesia

Kemajuan teknologi AI, seperti model generatif video Google Veo 3, memungkinkan pembuatan cuplikan video sinematik berkualitas tinggi hanya dari perintah teks. Kemudahan ini mendorong penyebaran disinformasi visual (*deepfake*) berpotensi menyesatkan publik. Materi video yang sangat meyakinkan bahkan sulit dibedakan dari kenyataan bisa disalahgunakan untuk menyebarkan narasi palsu. Dalam konteks demokrasi Indonesia, peningkatan manipulasi visual semacam itu dipandang sebagai ancaman serius yang dapat merusak proses politik dan kepercayaan publik (Islam et al., 2024). Sebagian penelitian menunjukkan disinformasi visual dapat meningkatkan minat awal masyarakat terhadap politik, misalnya dengan konten yang provokatif atau menghibur. Pada Pemilu serentak Tahun 2024 sebagian besar politisi yang berkampanye telah menggunakan media Generatif AI sebagai media komunikasi kepada konstituen (BBC News Indonesia, 2024; CNBC, 2024; Megashift Fisipol UGM, 2024). Penggunaan *deepfake* dalam iklan politik menghasilkan ketertarikan besar dan dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan partisipasi pemilih (Labuz & Strnad, 2025).

Namun, efek tersebut ternyata lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. *Deepfake* yang bersifat manipulatif justru mengikis nilai epistemik dan etis dari wacana publik demokratis. Pawelec menegaskan bahwa *deepfake* menghambat *empowered inclusion*, yakni partisipasi bermakna warga dalam diskusi publik, karena proses akuntabilitas wakil rakyat terganggu dan kelompok rentan seperti kelompok minoritas yang semakin terpinggirkan (Pawelec, 2022). Selain itu, *deepfake* merusak agenda *formation deliberatif* dengan menurunkan kualitas epistemik diskusi dan mengikis empati antarkelompok. Dengan demikian, meskipun khalayak mungkin lebih terlibat secara kuantitas, kualitas debat publik dan pemahaman rasional justru menurun. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi *deliberative* Mansbridge et al. (2010) yang menekankan inklusivitas warga dan diskusi rasional berbasis informasi akurat. Dengan rongrongan disinformasi visual, proses deliberatif menjadi sulit terlaksana dan partisipasi publik yang bermakna bisa terkikis.

Pemilu sangat rentan terhadap manipulasi visual. Konten video palsu dapat menyerang tokoh atau lembaga pemilu secara langsung. Sebagai contoh, penggunaan informasi visual yang dirancang untuk menjatuhkan lawan politik dan mendegradasi kepercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gambar atau video *deepfake* yang tampak asli dapat menyebar cepat di media sosial, memicu keraguan atas legitimasi proses pemilu. Trennya pun nyata, laporan global menyebut teknologi *deepfake* sudah banyak digunakan dalam kampanye di negara-negara besar (termasuk India dan Indonesia). AI generatif memungkinkan penyebaran informasi politik palsu, dengan narasi palsu, konten gambar/video, dan peniruan suara yang menguntungkan pihak tertentu (Islam et al., 2024). Di Indonesia, konten manipulatif semacam itu diprediksi akan banyak muncul dalam Pemilu yang akan datang pada Tahun 2029, menciptakan ketidakpercayaan warga terhadap hasil pemilihan. Kepercayaan publik yang menurun berujung pada menurunnya legitimasi lembaga pemilu. Keraguan berkepanjangan terhadap keaslian informasi dapat menyulitkan pemerintah mendulang dukungan untuk program publik. Dengan kata lain, manipulasi visual tidak hanya mempengaruhi suara individu, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan dasar pada institusi demokrasi.

Di Indonesia, disinformasi visual sering mengeksploitasi isu politik identitas. Riset menunjukkan narasi kampanye calon presiden menitikberatkan isu agama dan ras sebagai ancaman bagi persatuan negara. Konten manipulatif video maupun gambar yang menyorot SARA (suku-agama-ras) dapat membangkitkan ketegangan sektarian dan pecahnya konflik sosial. Belinda mencatat bahwa konten manipulasi informasi yang memuat politik identitas dan SARA berpotensi memicu konflik sosial melalui saling kecurigaan antar-komunitas (Belinda et al., 2023). Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Polarisasi semacam ini berimbas pada polarisasi politik, warga cenderung membela kelompok identitasnya sendiri dan menolak pertukaran pendapat yang sehat. Narasi identitas digunakan untuk menciptakan sentimen takut dan marah, dengan tujuan memperkuat dukungan terhadap calon tertentu dan melemahkan lawan. Dengan demikian, disinformasi visual berbasis identitas tidak hanya membelokkan informasi, tetapi juga merongrong kohesi sosial, membuka potensi konflik horizontal berbasis suku, agama, atau etnis.

Secara normatif, demokrasi deliberatif menekankan pentingnya kebebasan informasi dan dialog rasional. Ketersediaan informasi akurat adalah prasyarat agar warga dapat terlibat secara bermakna dalam proses public (Habermas, 1984; Mansbridge et al., 2010). Dalam kerangka ini, UNESCO menekankan bahwa antidotum disinformasi adalah peningkatan akses informasi publik. Artinya, cara efektif melawan hoaks bukan dengan sensor semata, tetapi dengan menyediakan sumber kebenaran yang terbuka. Namun, disinformasi visual ibarat dobel ancaman, tidak hanya menyesatkan, tapi juga menyulitkan dalam melakukan verifikasi informasi. *Deepfake* mengikis rasa saling empati dan menghargai antarwarga, yang justru esensial untuk ruang publik demokratis (Pawelec, 2022). Dalam iklim polarisasi identitas, disinformasi berperan menggencarkan narasi kami vs mereka, memperlebar jurang antara kelompok berbeda. Mempertahankan kebebasan informasi dan integritas ruang diskursus publik sangat penting. Selain regulasi teknologi, diperlukan literasi media yang kuat dan transparansi informasi dari pemerintah. Dengan kata lain, demokrasi Indonesia perlu ditegakkan di atas landasan informasi bebas dan terpercaya, yang menolak manipulasi dan menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekuatan, agar polarisasi tak berubah menjadi konflik sosial yang bersifat horizontal maupun vertikal.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan perspektif damai dan resolusi konflik, kehadiran teknologi AI *Google Veo 3* menandai fase baru dalam lanskap kewaspadaan nasional, politik, dan demokrasi di Indonesia. Kemampuan menghasilkan konten visual yang sulit dibedakan menjadikan *Google Veo 3* sebagai ancaman multidimensi, meliputi aspek teknis, identitas nasional, demokrasi, politik, dan bela negara. Di tengah penetrasi internet yang tinggi dan literasi digital yang masih rendah, disinformasi visual berpotensi memicu polarisasi politik menjadi eskalasi konflik, mengikis nilai-nilai Pancasila, serta melemahkan semangat bela negara dan berpotensi merusak perdamaian. Ancaman ini semakin signifikan ketika disinformasi dimanfaatkan sebagai instrumen *informational warfare* untuk memanipulasi opini publik dalam kontestasi politik (pemilu) dan demokrasi, sehingga mengganggu stabilitas Keamanan nasional Negara.

Menghadapi risiko strategis tersebut, diperlukan strategi komprehensif dan lintas sektor yang memadukan penguatan literasi digital berbasis nilai kebangsaan, pendidikan bela negara sejak usia dini, pengembangan regulasi adaptif, deteksi dini terhadap konten manipulatif, serta produksi kontra-narasi visual yang meneguhkan identitas nasional. Pendekatan *Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta* (Sishankamrata) perlu diperluas ke ranah digital, menjadikan setiap warga negara sebagai agen aktif dalam penyaringan informasi dan penangkalan agitasi dan propaganda visual. Sinergi antara pemerintah, aparat Keamanan dan intelijen, penyelenggara pemilu, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci membangun ketahanan

ideologis, politik, dan demokratis bangsa. Dengan penguatan kolaborasi yang inklusif, teknologi AI tidak hanya dapat diminimalisir risikonya, tetapi juga diarahkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat integritas karakter bangsa, menjaga stabilitas politik, serta memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia pada era disrupsi informasi atas hadirnya teknologi AI *Google Veo 3*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Brigjen (Purn.) Dr. Halomoan FS Alexandra, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 dan Bapak Brigjen TNI (Chk) Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

## REFERENSI

- Adhari, N. R., Sundawa, D., Darmawan, C., & S. (2024). Counteracting the Negative Impact of Digital Technology through Strengthening Digital Citizenship Competencies as a Form of Strengthening the Values of Defending the Nation of the Young Generation. *KnE Social Sciences*, 288-301–288–301. <https://doi.org/10.18502/KSS.V9I19.16508>
- Afdhali, D. R., & Triadi, I. (2023). Eksistensi Pancasila sebagai landasan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman ideologi asing. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 510–519.
- Anggoro, S., & Albina, M. (2025). Nilai-nilai pilar Pancasila sebagai komitmen kebangsaan. *Socius: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14749086>
- Antara. (2025, July 4). *Google umumkan Veo 3 resmi hadir di Indonesia - ANTARA News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4944169/google-umumkan-veo-3-resmi-hadir-di-indonesia>
- Azzahra, N., Putro, D. R. S., Arviansyah, V., & Antoni, H. (2024). Pancasila Sebagai Strategi Ketahanan Bangsa di Era Disinformasi Digital. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(4), 140–147. <https://doi.org/10.59581/GARUDA.V2I4.4505>
- BBC News Indonesia. (2024, November 13). *Pilkada 2024: Fenomena meniru taktik kampanye Prabowo-Gibran di berbagai daerah - BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce8d6j72kk1o>
- Belinda, F., Somantri, G. R., Runturambi, A. J. S., & Puspitasari, M. (2023). Manipulation of Information in the 2024 Election in Indonesia: Political dynamics in the post-truth era. *Migration Letters*, 21(3), 43–58.
- Bhardwaj, B., & Sharma, D. (2024). Changing Dimensions of Conflict Management: Digital Technology and Artificial Intelligence. In *Managing and Negotiating Disagreements: A Contemporary Approach for Conflict Resolution* (pp. 185–198). Emerald Publishing Limited.
- Bygrave, L. A. (2022). *Data privacy law: An international perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- CNBC. (2024, February 8). *Media Asing Sorot Pilpres 2024, Ada Keterlibatan AI*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240208133842-37-512853/media-asing-sorot-pilpres-2024-ada-keterlibatan-ai>
- Faridah, S., Timur, F. G. C., & Afifuddin, M. (2023). Karakter bangsa dan bela negara: Menumbuhkan identitas kebangsaan dan komitmen nasionalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 137–148. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5863/3447/16661>
- felloai.com. (2025). *New Google Video Generator Veo 3 Is Breaking Reality! Are We Cooked?* <https://felloai.com/2025/06/new-google-video-generator-veo-3-is-breaking-reality-are-we-cooked/>
- Fitri, S. N., Kurniawan, D. E., & Nugraha, R. (2022). Penguatan nilai kebangsaan melalui literasi digital pada generasi muda. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 85–100. <https://doi.org/10.21009/JPK.122.07>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Google Indonesia. (2025, July 4). *Veo 3 resmi diluncurkan di Indonesia*. <https://blog.google/intl/id-id/company-news/technology/veo-3-resmi-diluncurkan-di-indonesia/>
- Graber, D. A. (1990). Seeing is remembering: How visuals contribute to learning from television news. *Journal of Communication*, 40(3), 134–156. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1990.tb02275.x>
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society* (1st ed., Vol. 1). Beacon Press.
- Hartono, D. (2022). Fenomena kesadaran bela negara di era digital dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14–33.
- Idn Times. (2025, May 23). *Google Rilis Veo 3 dan Flow, Bikin Film dengan AI Kini Mudah | IDN Times*. <https://www.idntimes.com/tech/trend/google-rilis-veo-3-flow-c1c2-01-tffwg-k1vb30>

- Islam, M. B. E., Haseeb, M., Batool, H., Ahtasham, N., & Muhammad, Z. (2024). AI threats to politics, elections, and democracy: A blockchain-based deepfake authenticity verification framework. *Blockchains*, 2(4), 458–481. <https://doi.org/10.3390/blockchains2040020>
- Jakus, G. (2018). *Human-computer interaction: Psychological and cognitive aspects*. Springer.
- Jatnika, D. C., Adiansah, W., & Jatnika, D. D. (2025). Teknologi Digital Dalam Upaya Mediasi Konflik Sosial: Kajian Literatur Naratif. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.24198/JKRK.V7I1.60615>
- Kompas. (2025, May 21). *Google Rilis Veo 3 dan Imagen 4, Bisa Bikin Video Suara Asli dan Gambar 2K*. <https://tekno.kompas.com/read/2025/05/21/10090047/google-rilis-veo-3-dan-imagen-4-bisa-bikin-video-suara-asli-dan-gambar-2k>
- Kurniati, A. (2024). Study of the Artificial Intelligence Role in Achieving Cybersecurity for Critical Information Infrastructure. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 6(2), 154–165. <https://doi.org/10.54849/MONAS.V6I2.251>
- Labuz, M., & Nehring, C. (2024). On the way to deep fake democracy? Deep fakes in election campaigns in 2023. *European Political Science*, 23(4), 454–473. <https://doi.org/10.1057/S41304-024-00482-9/METRICS>
- Labuz, M., & Strnad, G. (2025). Political advertising with the use of deep fakes—Can deliberative democracy really benefit from this strategy? *Politics & Policy*, 53, e70035. <https://doi.org/10.1111/polp.70035>
- Latif, M. N. A., & Waroi, A. (2024). False Reality: Deepfakes in Terrorist Propaganda and Recruitment. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 1(1), 41–59. <https://doi.org/10.70710/SITJ.V1I1.5>
- Lindgren, S. (2023). *Digital Media and Society* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Penerbit Buku Kompas. [https://books.google.com/books/about/Resolusi\\_konflik.html?hl=id&id=fGODswEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Resolusi_konflik.html?hl=id&id=fGODswEACAAJ)
- Mansbridge, J., Bohman, J., Chambers, S., Estlund, D., Føllesdal, A., Funk, A., Lafont, C., Manin, B., & Martí, J. L. (2010). The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy. *Journal of Political Philosophy*, 18(1), 64–100. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2009.00344.x>
- Megashift Fisipol UGM. (2024). *AI untuk Memoles Citra Politisi dalam Pilpres 2024: Apa yang Harus Kita Ketahui? – Megashift Fisipol UGM*. <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/04/29/ai-untuk-memoles-citra-politisi-dalam-pilpres-2024-apa-yang-harus-kita-ketahui/>
- Mirghahari, M. (2023, July 17). *The Newest Weapon in Irregular Warfare – Artificial Intelligence*. <https://irregularwarfarecenter.org/publications/perspectives/the-newest-weapon-in-irregular-warfare-artificial-intelligence/>
- Nikmatul Fitri, I., Enjel Siahaan, R., Zahri Valent Affandi, M., Akbar, M., Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (2025). Dampak Teknologi Digital terhadap Kesadaran Bela Negara Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2I1.405>
- Norman, J. M., & Mikhael, D. (2023). Rethinking the Triple-Nexus: Integrating Peacebuilding and Resilience Initiatives in Conflict Contexts. *Journal of Peacebuilding and Development*, 18(3), 248–263. [https://doi.org/10.1177/15423166231200210/SUPPL\\_FILE/SJ-DOCX-1-JPD-10.1177\\_15423166231200210.DOCX](https://doi.org/10.1177/15423166231200210/SUPPL_FILE/SJ-DOCX-1-JPD-10.1177_15423166231200210.DOCX)
- Nurdin, R., & Nugraha, H. (2025). Disinformasi AI dan ancaman terhadap keamanan informasi nasional. *Jurnal Strategi Dan Keamanan Digital*, 3(1), 58–74. <https://doi.org/10.31294/jsdk.v3i1.2025>
- Nurdin, S. W., & Nugraha, I. F. (2025). Ancaman deepfake dan disinformasi berbasis AI: Implikasi terhadap keamanan siber dan stabilitas nasional Indonesia. *JIMR: Journal of International Multidisciplinary Research*, 4(1), 73–92.
- Paterson, T., & Hanley, L. (2020). Political warfare in the digital age: Cyber subversion, information operations and 'deep fakes.' *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 439–454. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1734772>
- Pawelec, M. (2022). Deepfakes and democracy (theory): How synthetic audio-visual media for disinformation and hate speech threaten core democratic functions. *Digital Society*, 1(2), 19. <https://doi.org/10.1007/s44206-022-00010-6>
- Pratiwi, Y. R., Aslinda, C., & Fitri, A. (2024). Media Literacy: Deepfakes And Teenagers Experiences In Hoax Production. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.32509/MIRSHUS.V4I1.54>
- Putri, B. P., Astrianti, D., & Apriyani, N. (2025). Identitas nasional dan persatuan dalam keberagaman. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Indonesia*, 7(1), 23–34. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/download/7881/8989/14084>
- Rahayu, M., Farida, R., & Apriana, A. (2019). Kesadaran bela negara pada mahasiswa. *Epigram*, 16(2), 175–180. <https://doi.org/10.32722/epi.v16i2.2232>
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175–186. <https://doi.org/10.47650/JGLP.V6I2.1547>

- Shu, K., Bhattacharjee, A., Alatawi, F., Nazer, T. H., Ding, K., Karami, M., & Liu, H. (2020). Combating Disinformation in a Social Media Age. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(6). <https://doi.org/10.1002/widm.1385>
- Sonni, A. F., Mau, M., Akbar, M., & Putri, V. C. C. (2025). AI and Digital Literacy: Impact on Information Resilience in Indonesian Society. *Journalism and Media 2025*, Vol. 6, Page 100, 6(3), 100. <https://doi.org/10.3390/Journalmedia6030100>
- Tempo. (2025, July 17). *Contoh Prompt Google Veo 3 Berbahasa Indonesia untuk Membuat Video* | tempo.co. <https://www.tempo.co/digital/contoh-prompt-google-veo-3-berbahasa-indonesia-untuk-membuat-video-2025652>
- The Conversation. (2019, April 19). *"Cebong" versus "Kampret": Polarisasi politik pascapilpres 2019 semakin tajam*. <https://theconversation.com/cebong-versus-kampret-polarisasi-politik-pascapilpres-2019-semakin-tajam-115477>
- thelocalbrand.com. (2025, May). *Op-Ed: Google's VEO3 and the Future of Visual Storytelling—A Revolution or a Requiem? – The Local Brand®*. <https://thelocalbrand.com/googles-veo3-and-future-of-visual-storytelling/>
- TIME. (2021). *Teaching Cyber Citizenship Must Become a National Priority* | TIME. <https://time.com/5932134/cyber-citizenship-national-priority/>
- TIME. (2025). Google's new AI video tool Veo sparks debate over deepfakes and public manipulation. *TIME Magazine*. <https://time.com/2025/veo-google-deepfake-debate/>
- Turk, V. (2024, December 10). *Video is AI's new frontier – and it is so persuasive, we should all be worried* | Victoria Turk | The Guardian. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/dec/10/ai-openai-sora-video-new-frontier>
- van Diggelen, J., Aidman, E., Rowa, J., & Vince, J. (2025). *Designing AI-Enabled Countermeasures to Cognitive Warfare*. <https://arxiv.org/pdf/2504.11486>
- Verdoliva, L. (2020). Media Forensics and DeepFakes: an overview. *IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing*, 14(5), 910–932. <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2020.3002101>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.